

STUDI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010-2015

Alfrianingsih Sanggona¹, Rosida P. Adam dan Yunus Sading²

alfria99@yahoo.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to find out the development of local revenue and fiscal ability in its implication on economic growth and express some views in running policy to improve economic growth. This was a qualitative research with data analysis method using financial ability stipulated by Planning and National Development Board. Study of local revenue in Poso regency indicates that it has not meaningful development yet. Contribution of real of local revenue in Poso regency on state budget is still less, which is 5%. Local revenue still more influenced by central government that makes economic development run slowly. God cooperation from all party will surely give a great contribution for local revenue availability. The local revenue gained should be returned to society through infrastructure development which can be directly enjoyed by them. The research result reveals that ratio of local finance independency obtained the outcomes on the average of 3% or lies in instructive relation pattern. Fiscal decentralization degree ratio and routine ability index ratio show that local finance ability still lack, which is 5% and 6%. On suitability ratio, routine expenditure is higher than development expenditure with gap as much as 63%. Growth ratio, overall has negative growth because the improvement of local real revenue and local income total are not followed by development expenditure growth, but followed by routine expenditure growth. By seeing the analysis result, the local revenue development of Poso regency has not shown a meaningful development and local finance ability for the sake of local autonomy implementation that considered still lack.

Keyword: Study of Fiscal Capacity of Poso Regency

Tingkat pendapatan daerah kabupaten Poso dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 cenderung meningkat, dibutuhkan kejelian dalam melihat dan mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Dari situ dapat dilihat dapatkah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengelolanya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya.

Perubahan pola pengelolaan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah menjadi daerah otonom. Keadaan tersebut diikuti dengan penyerahan sebagian kewenangan meliputi tugas dan fungsi dari pemerintahan daerah sehingga daerah membutuhkan

pendanaan lebih yang berimplikasi pada kebutuhan akan transfer dana perimbangan yang diarahkan sebagai pendampingan bersamaan dengan pendapatan asli daerah untuk kegiatan pembangunan ekonomi.

Pendapatan Daerah selalu mengalami peningkatan yang tentunya dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan dikabupaten Poso. Dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah tentunya diharapkan perekonomian di kabupaten Poso akan semakin meningkat pula. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Poso dengan memperoleh Data melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Poso, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

Indikator dari pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah kabupaten Poso tahun 2010-2015, digunakan Indeks Kemampuan Keuangan yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS 2003) berupa : rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi alokasi anggaran pembangunan diharapkan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Poso. Alokasi anggaran pembangunan yang terencana dan lebih berpihak kepada masyarakat, diharapkan akan menjadi perantara bagi terciptanya linearitas antara semangat pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sebagai pembiayaan belanja publik dengan harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD Kabupaten Poso juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, sehingga sudah seharusnya bias meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso yang berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun anggaran 2010-2015. Dari hasil APBD dan LRA tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kemampuan keuangan Kabupaten Poso selama enam tahun anggaran tersebut.

Hasil perhitungan dan analisis beberapa rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten Poso tahun anggaran 2010-2015:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010-2015

Thn	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
2010	17.653.453.119,29	537.309.806.357,00	3%	Instruktif
2011	25.654.921.613,41	669.773.643.870,00	4%	Instruktif
2012	26.224.302.860,06	695.628.439.477,50	4%	Instruktif
2013	33.409.776.073,51	789.278.559.682,00	4%	Instruktif
2014	66.747.550.693,51	910.596.108.336,00	7%	Instruktif
2015	70.168.821.743,09	1.079.673.371.480,00	6%	Instruktif
Rata - Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			5%	Instruktif

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2016 (Diolah kembali)

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber pendapatan asli daerah dan yang masih rendah. Pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah.

2. Rasio Kecerasan

Tabel 2. Rasio Belanja Modal Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2015

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Rasio Belanja Modal
2010	100,973,525,491.00	590,006,248,837.59	17%
2011	136,250,153,573.00	669,530,141,587.41	20%
2012	145,920,222,002.00	736,679,387,042.39	20%
2013	134,871,714,584.47	795,670,064,586.56	17%
2014	185,880,476,707.00	957,526,071,242.76	19%
2015	176,481,354,247.00	1,146,037,044,531.13	15%

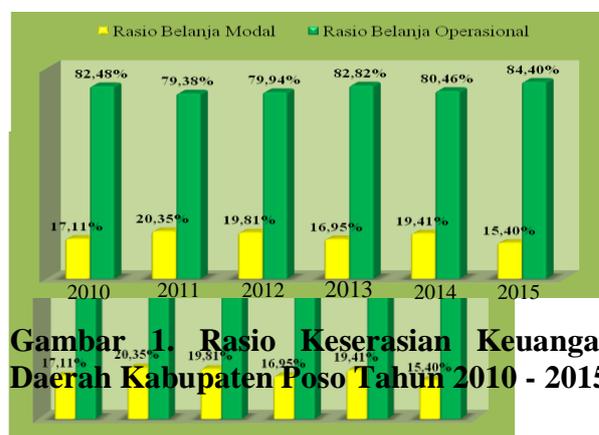
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2016 (Diolah kembali)

Tabel 3. Rasio Belanja Operasional Kabupaten Poso Tahun 2010-2015

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasional
2010	486,628,069,346.59	590,006,248,837.59	82%
2011	531,450,755,164.41	669,530,141,587.41	79%
2012	588,874,011,040.39	736,679,387,042.39	80%
2013	795,670,064,586.56	795,670,064,586.56	100%
2014	770,468,889,535.76	957,526,071,242.76	80%
2015	967,233,519,420.13	1,146,037,044,531.13	84%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2016 (Diolah kembali).

Banyaknya manfaat yang diperoleh apabila pelaksanaan belanja pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri ternyata belum mampu dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Poso. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan rasio keserasian Kabupaten Poso tahun anggaran 2010-2015 yang menunjukkan masih rendahnya rasio belanja pembangunan apabila dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Dimana, hasil rata-rata dari rasio belanja pembangunan sebesar 18% dan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 82%, terdapat gap sebesar 63%. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan jumlah tersebut.



Ketimpangan yang terjadi antara belanja rutin dan belanja pembangunan disebabkan oleh tingginya belanja pegawai, disebabkan karena banyaknya pengeluaran yang diperuntukkan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil, serta membiayai kegiatan dari dinas-dinas misalnya sosialisasi program maupun perjalanan dinas. Belanja modal atau pembangunan terbatas, hanya di peruntukkan pada beberapa bidang saja, misalnya: bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, dan bidang kesehatan.

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Table 4. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pengeluaran Rutin (Rp)	Indeks Kemampuan Rutin	Kemampuan Keuangan Daerah
2010	17,653,453,119.29	489,032,723,346.59	4%	Sangat Kurang
2011	25,654,921,613.41	489,032,723,346.59	5%	Sangat Kurang
2012	26,224,302,860.06	590,759,165,040.39	4%	Sangat Kurang

2013	33,409,776,073.51	660,798,350,002.09	5%	Sangat Kurang
2014	66,747,550,693.51	771,645,594,535.76	9%	Sangat Kurang
2015	70,168,821,743.09	1,038,007,532,685.46	7%	Sangat Kurang
Rata - Rata Indeks Kemampuan Rutin			6%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2016 (Diolah kembali).

Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Poso tergolong dalam skala yang masih sangat kurang, ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Poso masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai belanja rutin, yang selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal



Gambar 2. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2015

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Table 5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

No	Keterangan	Tahun Anggaran					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PAD	-22%	45%	2%	27%	100%	5%
2	Total Pendapatan	-3%	25%	4%	14%	19%	18%
3	Belanja Rutin	3%	9%	20%	54%	17%	35%
4	Belanja Pembangunan	-80%	35%	7%	-8%	38%	-5%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso, 2016 (Diolah kembali).

Berdasarkan tabel 5 diatas, disampaikan bahwa rasio pertumbuhan keuangan Daerah Kabupaten Poso belum berkembang dengan baik, hal tersebut ditunjukkan oleh rasio pertumbuhan PAD tahun 2010 dibawah dari keinginan yaitu -22%, hal ini disebabkan karena ada penurunan jumlah pendapatan daerah dari pos retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebesar -16% dan -56%. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cukup baik walaupun belum ada kenaikan yg signifikan. Pada tahun 2014 kenaikannya sudah sampai 100%, namun di tahun selanjutnya hanya mampu naik sebesar 5%. Total pendapatan Kabupaten Poso tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -3% dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi penurunan jumlah pendapatan asli daerah, kemudian tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu ada peningkatan.

Belanja rutin sejak sejak enam tahun terakhir hampir selalu mengalami kenaikan. Belanja pembangunan selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2013 dan 2015 terjadi penurunan belanja pembangunan sebesar -8% dan -5% selain karena dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh kenaikan dari belanja rutin dalam hal ini adanya pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang cukup besar, secara otomatis menambah beban belanja APBD.

Perkembangan dan Implikasi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Poso

Berdasarkan hasil analisis tentang pendapatan daerah dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso, menunjukkan bahwa ketersediaan dana di daerah akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Poso.

Pendapatan Daerah di Kabupaten Poso, belum menunjukkan perkembangan yang berarti karena belum maksimalnya penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber keuangan daerah, masih lebih terpengaruh dengan bantuan pemerintah pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi masih berjalan pelan. Meskipun dibanding dengan sebelumnya, apalagi ditambah dengan keterpurukannya Kabupaten Poso akibat konflik yang melanda, saat ini sudah terlihat beragam pembangunan yang terjadi. Meskipun masih lebih diutamakan bagi kepentingan umum, seperti pelebaran jalan utama yang dilewati oleh kendaraan yang keluar, masuk, ataupun yang melewati Daerah Kabupaten Poso.

Seharusnya apabila Pendapatan daerah meningkat, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Poso.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso terus menerus menggiatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena manajemen penggalan potensi PAD berada di dalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sendiri, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat berpotensi bagi peningkatan sumber-sumber PAD. Sumber daya alam yang tersedia, seyogyanya akan menjadi pioner bagi peningkatan PAD Kabupaten Poso, apabila

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, lebih serius lagi dalam mengelola dan mempunyai tekad terhadap pemaksimalan penggalan potensi tersebut, dengan membuka seluas-luasnya keran bagi investor untuk mengelola SDA yang ada. Tentunya stabilitas keamanan juga menjadi faktor utama didalam upaya menjaring investor mengingat sejarah kabupaten Poso yang merupakan bekas daerah konflik, keterlibatan semua kalangan tentu diperlukan dalam hal ini.

Apabila daerah mampu untuk memaksimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah, maka akan turut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi PAD yang tersedia di Kabupaten Poso, maka tingkat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang. Selanjutnya daerah akan lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Melalui belanja rutin, belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, dengan sendirinya akan terjadi peningkatan jumlah *output* barang dan/atau jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Poso

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat dari tercapainya pembangunan ekonomi, namun perlu diperhatikan bahwa tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan pembangunan, namun lebih kepada Pemerintah Daerah yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Apakah

pembangunan hanya menyentuh atau berefek kepada segelintir orang tertentu atau menyentuh kepada sebagian besar masyarakat. Apabila hanya segelintir orang yang bias menikmati pembangunan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan daerah dalam mengkondisikan ketersediaan dana, maka akan mudah untuk penyelenggaraan pembangunan yang tujuan utamanya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian dana transfer dari pusat kepada pemerintah daerah yang begitu besar seharusnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Poso akan menurun.

Tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Poso dalam periode 2010-2015

dianggap masih kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah selama enam tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 5% dengan pola hubungan yang instruktif. Dari hasil tersebut, tergambar dengan jelas masih besarnya ketergantungan pemerintah Kabupaten Poso terhadap sumber-sumber dana bantuan dari pihak ekstern, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dengan komponen bantuan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian, pemerintah Kabupaten Poso masih lebih memprioritaskan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Hasil rata-rata dari rasio belanja pembangunan sebesar 18% dan rasio belanja operasional sebesar 82%. Terdapat kesenjangan sebesar 63%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten sehingga lebih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin dan penghematan pada belanja lainnya.
- c. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama enam tahun menunjukkan angka rata-rata sebesar 5% dengan kemampuan keuangan yang tergolong sangat kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Poso belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dan masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran
- d. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan Rasio IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata hanya sebesar 6% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 0,00% - 20,00% yang dinilai sangat kurang. Artinya, belum mampu membiayai belanja

rutin yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

- e. Berdasarkan rasio pertumbuhan (*growth ratio*), rasio pertumbuhan keuangan Daerah Kabupaten Poso belum berkembang dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh PAD Kabupaten Poso pada tahun 2010 rasio pertumbuhan dibawah dari keinginan yaitu -22%, tahun 2011 naik sebesar 45%, tahun 2012 sebesar 2%, tahun 2013 sebesar 27%, tahun 2014 sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 5%. Total pendapatan pada tahun 2010 -3%, tahun 2011 sebesar 25%, tahun 2012 sebesar 4%, tahun 2013 sebesar 14%, tahun 2014 sebesar 19% dan pada tahun 2015 sebesar 18%. Belanja rutin pada tahun 2010 sebesar 3%, tahun 2011 sebesar 9%, tahun 2012 sebesar -20%, tahun 2013 sebesar 54%, tahun 2014 sebesar 17% dan pada tahun 2015 sebesar 35%. Belanja pembangunan, pada tahun 2010 -80%, pada tahun 2011 35%, pada tahun 2012 sebesar 7%, pada tahun 2013 sebesar 54%, pada tahun 2014 sebesar 17% dan pada tahun 2015 35%. Belanja pembangunan pada tahun 2010 sebesar -80%, pada tahun 2011 sebesar 35%, pada tahun 2012 sebesar 7%, pada tahun 2013 sebesar -8%, pada tahun 2014 sebesar 38%, dan pada tahun 2015 menurun sebesar -5%. dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Poso menunjukkan rata-rata yang negatif, karena pertumbuhan PAD dan TDP tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, melainkan diikuti oleh belanja rutin.

Kebijakan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Poso

Pemerintah daerah utamanya harus lebih menitikberatkan dalam upayanya menghadirkan sumber-sumber keuangan daerah. Potensi sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan alam dan sumber pendapatan lain yang sah harus bisa diintensifkan pemasukannya. Tentu terhadap upaya ini,

regulasi mengikat yang bersifat transparan, artinya dalam segala bentuk penarikan yang dilakukan, harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan. Pelaku-pelaku pemungutan di lapangan harus orang yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Perusahaan daerah (BUMD) yang merupakan salah satu pemasok dana ke kas daerah harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kontribusinya bagi PAD juga akan meningkat. Selain itu perlu penciptaan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik lokal maupun asing guna menanamkan modalnya di Kabupaten Poso sehingga dapat meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Jika PDRB meningkat, maka pendapatan perkapita masyarakat meningkat dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

Kerjasama yang baik dari semua pihak, tentu akan memberikan pengaruh besar bagi ketersediaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang diperoleh, sudah seharusnya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati secara langsung bagi seluruh masyarakat. Mudah-mudahan akses dalam usaha mencari nafkah bagi masyarakat, tentu akan berimplikasi terhadap kemampuannya membayar tagihan baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Modal dasar desentralisasi fiskal seharusnya berasal dari Pendapatan daerah. Tetapi nyatanya, PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 7%. Sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU). Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan DAU baik melalui belanja rutin, pembangunan/ infrastruktur/ modal, ataupun belanja lainnya diharapkan akan memunculkan

pelaku-pelaku ekonomi baru dalam masyarakat.

Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan *multiple effect* sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mengurangi *gap* yang besar antara belanja pembangunan dan belanja rutin dalam hal ini belanja pegawai, perlu adanya pertimbangan mengenai pemberian remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil agar mengurangi jumlah anggaran belanja langsung (honor pegawai). Selain itu, kebijakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di instansi pemerintahan juga perlu pertimbangan kemampuan keuangan yang lebih cermat agar tidak membebani APBD.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pendapatan Daerah di Kabupaten Poso, belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Dalam periode enam tahun terakhir, pendapatan daerah meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di tahun 2015 menurun masing-masing sebesar -4% dan -73,1%. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 5%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena tolak ukur kemandirian keuangan daerah dinilai dari sumber pendapatan asli daerah. Sumber keuangan daerah Kabupaten Poso masih lebih terpengaruh dengan bantuan pemerintah pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi masih berjalan pelan. Meskipun demikian, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat keterpurukan Kabupaten Poso akibat konflik yang melanda, saat ini sudah terlihat beragam

pembangunan yang terjadi. Pemerintah daerah utamanya harus lebih menitikberatkan dalam upayanya menghadirkan atau menciptakan sumber-sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat, secara otomatis kemampuan dan kemauan membayar pajak ataupun retribusi semakin meningkat.

Kemampuan keuangan daerah dalam mengkondisikan ketersediaan dana belum maksimal dan masih tergolong kurang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang tujuan utamanya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian dana transfer dari pusat kepada pemerintah daerah yang begitu besar seharusnya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Poso sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil penelitian rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 3% atau berada pada pola hubungan instruktif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih kurang, yaitu sebesar 5% dan 6%. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan dengan *gap* sebesar 63%. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena peningkatan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya, karena masih berfluktuasi pertumbuhan belanja pembangunan, dan belanja rutin yang terus bertambah.

Rekomendasi

Bagi Pemerintah Daerah, perlu untuk menggali secara maksimal seluruh potensi

pendapatan daerah yang ada dan dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya dengan membuat regulasi yang dapat diterima oleh segala kalangan. Mengurangi *gap* yang besar antara belanja pembangunan dan belanja rutin dalam hal ini belanja pegawai, perlu adanya pertimbangan mengenai pemberian remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil agar mengurangi jumlah anggaran belanja langsung (honor pegawai). Selain itu dalam kebijakan pengangkatan calon pegawai negeri sipil ataupun tenaga kontrak di instansi pemerintah perlu perhitungan yang cermat agar tidak membebani APBD.

Bagi masyarakat, dibutuhkan kerja sama yang baik dengan mengikuti regulasi yang akan atau telah dibuat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Karena dengan dukungan dari seluruh masyarakat, maka suatu ketentuan yang dibuat, akan secara nyata berguna bagi seluruh masyarakat, terlebih terhadap upaya pembangunan ekonomi yang dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan data yang lebih panjang dan lebih lengkap, sehingga ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincolin. 2004. *“Ekonomi Pembangunan”*. Edisi Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *“Ekonomi Moneter”*. Edisi 3, Yogyakarta. BPFE.
- Davey, KJ. 1988. *“Pembiayaan Pemerintahan Daerah”*. Terjemahan oleh Amanullah dkk. Jakarta: UI Press. Davey, Kenneth, 1999, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Glasson, Jhon. 1977. *“Pengantar Perencanaan Regional”*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Jhingan, M.L. 2008. *“Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”*. Penerjemah: D. Guritno. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koswara, E. 2001. *“Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kamandirian Rakyat”*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Mahmudi. 2010. *“Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik”*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamesah, D. J. 1995. *“Sistem Administrasi Keuangan Daerah”*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *“Teori Makroekonomi”*. Edisi Keempat. Terjemahan: Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*. Andi, Yogyakarta.
- Nataluddin. 2001. *“Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi”*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, M.P. 2010. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2008. *“Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Yuliati. 2001. *“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah”*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPPYKPN.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003. *“Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah”*: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya Yang Dilakukan Daerah.